

## Reposisi Oposisi

Sebagai tindakan politik, reposisi PAN tidak dapat dilepaskan dari motif politik baik yang dipengaruhi faktor internal maupun eksternal. Secara internal nampaknya telah terjadi pembacaan ulang terhadap keberadaan PAN di KMP yang kalau menganut alur pemikiran pakar komunikasi W Barnett Pearce & Vernon Comen (*Communication Capstone: 2000*) disebut sebagai 'pengkoordinasian makna' yang dinilai kurang menguntungkan secara politik ke depan. Akibatnya telah terjadi rekonstruksi politik PAN dengan mereposisi diri dari partai oposisi menjadi partai pendukung pemerintah. Sementara itu, secara eksternal PAN berhadapan dengan stimulus politik Presiden Jokowi yang membuka diri kepada partai di luar KIH untuk bergabung dalam gerbong koalisinya. *Bak pepatah pucuk dicinta ulam tiba* atau pepatah Jawa *tumbu entuk tutup*. Maka, terjadilah reposisi PAN.

*Kedua*, fragmentasi politik. Keluarnya PAN dari KMP semakin mempertegas karakter politik Indonesia selalu diwarnai fragmentasi politik baik pada level internal partai maupun gabungan antarpartai. Simak saja misalnya, PPP maupun Golkar masih menyimpan dualisme kepemimpinan yang belum menemukan ujung penyelesaiannya. *Ketiga*, kegagalan komunikasi politik. Mengelola komunikasi politik dalam keragaman budaya politik yang memiliki ideologi maupun realitas sosiologi politik yang berbeda merupakan tantangan terbesar dalam membangun kohesivitas sebuah koalisi. Komunikasi yang dimaknai sebagai membangun kesamaan makna dan kesetaraan di kalangan KMP nampaknya mengalami problem serius. Dominannya peran Prabowo dan Aburizal Bakrie dalam KMP menjadikan peran partai lain agak teralienasi, sehingga terjadi kesenjangan komunikasi. Kesenjangan komunikasi ini menjadi ruang kosong yang secara jeli dilihat oleh Presiden Jokowi untuk masuk bahkan pada akhirnya mampu membawa PAN keluar dari KMP dan bergabung ke KIH.

*Keempat*, konfigurasi dan konstelasi parlemen. Implikasi lanjutan dari reposisi PAN ini adalah mengubah konfigurasi dan konstelasi parlemen yang sebelum didominasi oleh KMP beralih ke KIH. Dengan demikian akan sangat dimungkinkan produk-produk politik

yang lahir sebelumnya dan dinilai merugikan partai anggota KIH akan 'ditinjau' ulang. Bila ini terjadi maka dinamika politik di parlemen akan kembali memanas.

Akhirnya, yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah kesejahteraan di tengah himpitan kesulitan yang mencekik. Pertanyaannya adalah apakah partai politik mampu mewu-

judkan kesejahteraan rakyat itu? Bila tidak, partai politik telah kehilangan ideologi dan elan vitalnya, dan hanya menjadi sekadar 'kendaraan politik' yang berorientasi kepentingan jangka pendek.

(Penulis adalah Dosen Komunikasi Islam FAI dan Sekretaris Akademik Program Pascasarjana UMY).-d

Sambungan hal 1



## Analisis KR Reposisi Oposisi

Dr M Nurul Yamin

**HENKANGNYA** Partai Amanat Nasional (PAN) dari Koalisi Merah Putih (KMP) ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) semakin mempertegas adagium bahwa tidak ada lawan dan kawan abadi dalam berpolitik. Diskursus publik pun merebak, tentu ada yang pro maupun kontra. Akibatnya, beragam tesa, antitesa, dan sintesa politik sebagai hasil konstruksi dan dekonstruksi realitas politik muncul silih berganti mewarnai dialektika politik Tanah Air.

Kehidupan politik itu sangat subjektif dan kontekstual. Artinya, apa yang dipandang benar seseorang, belum tentu benar bagi yang lain. Begitu pun juga, apa yang dinilai menguntungkan saat sekarang, mungkin akan dianggap merugikan pada saat yang lain. Setiap aktor politik memiliki kesadaran dan kebebasan, artinya jika pada suatu saat aktor politik bertindak sama seperti kebanyakan aktor politik yang lain, maka ia juga menyadari sepenuhnya kemungkinan untuk bertindak yang tidak sama pada saat yang lain. Bertindak sama atau tidak sama dalam suatu momentum politik menuntut strategi komunikasi politik tertentu berdasarkan hasil interaksi dan pembacaan terhadap kalkulasi realitas politik yang disebut sebagai *socially constructed reality* (Doyle Paul Johnson; 1994, 66). Dengan demikian sangat dimungkinkan bila suatu waktu sebuah partai politik mengambil sikap oposisi, tetapi di kesempatan yang lain mereposisi oposisinya menjadi koalisi pemerintah seperti yang dilakukan PAN.

Pertanyaannya, apakah makna reposisi PAN ini dalam dinamika politik nasional kita? Paling tidak terdapat beberapa hal yang bisa diajukan: *Pertama*, pengkoordinasian makna oposisi.

\*Bersambung hal 7 kol 1